

PENGARUH DISTRIBUSI PENDAPATAN TIDAK MERATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 1980 - 1993.

Agus Hasan P A.¹

PENDAHULUAN

Pada masa sebelum orde baru dimana perhatian pemerintah lebih banyak ditujukan terhadap masalah-masalah politik maka masalah ekonomi kurang mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat inflasi pada masa itu yang pernah mencapai 600% dan rendahnya tingkat pertumbuhan GNP per kapita bahkan untuk tahun-tahun tertentu mengalami pertumbuhan yang negatif.

Tabel 1.1. Pertumbuhan GNP per kapita pada harga konstan 1958, periode 1958-1966

Tahun	Pertumbuhan
1958	-
1959	- 1,8 %
1960	- 1,5 %
1961	1,7 %
1962	- 2,7 %
1963	- 2,7 %
1964	2,4 %
1965	0,5 %
1966	0,6 %

Sumber: Syahrir, Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia 1968 - 1992, hal 12.

Pemerintahan pada awal masa orde baru disamping juga menjaga stabilitas politik; mulai mencurahkan perhatiannya terhadap masalah ekonomi. Salah satu tindakan nyata yang segera terlihat ialah lahirnya UU PMA 1967 yang memungkinkan masuknya modal asing ke Indonesia.

Dengan bantuan *tim lima* Universitas Indonesia disusun disain pembangunan yang dikenal dengan sebutan PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Dalam lima Pelita yang sudah dilalui Indonesia kurang-lebih telah berhasil mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Dan menurut IMF, tahun 1986 - 1992 Indonesia telah berhasil mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%, serta pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,34% (BPS). Hal mana menyebabkan kenaikan yang sangat besar didalam pendapatan per kapita, yaitu US\$75 pada tahun 1967 menjadi US\$570 pada tahun 1991 dan menjadi US\$778 pada tahun 1994 (BPS). Dengan pendapatan nasional per kapita sebesar US\$ 778 maka menurut Dr. Mely G. Tan dan Mary Pangestu; Indonesia sudah masuk ke dalam negara-negara *Middle Income* sekalipun masih dilapisan bawah. Dengan demikian pendapatan per kapita seperti dia atas maka pendapatan per kapita Indonesia sudah lebih tinggi dari Philipina, RRC, Laos, Kamboja, Vietnam, dan hampir seluruh negara Afrika.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang dicapai di atas pada dasarnya karena keberhasilan Indonesia didalam melaksanakan transformasi struktur ekonomi. Dimana pada tahun 1967 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 51,8% sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan hanya sebesar 8,4% (BPS). Pada tahun 1993 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menurun menjadi 22,9% sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan meningkat menjadi 22,3% (BPS).

¹ Dosen tetap Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Katolik Parahyangan.

Dengan keberhasilan seperti dikemukakan di atas dan berdasarkan kriteria garis kemiskinan BPS, yaitu 2.100 kalori per hari atau Rp 27.905 di kota dan Rp18.244 di desa,² maka jumlah penduduk miskin (secara absolut) yang pada tahun 1976 mencapai 54,2 juta jiwa berhasil diturunkan menjadi 25,9 juta atau 13,67% pada tahun 1993.

Masalah *pertumbuhan ekonomi* dan *peningkatan pendapatan per kapita*; merupakan masalah yang berbeda dari masalah *distribusi pendapatan*. Angka pendapatan per kapita merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan angka yang sebenarnya diterima tiap penduduk. Berapa yang diterima tiap penduduk sebenarnya berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Dari sekian banyak indikator; salah satu indikator yang mudah digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ialah Rasio Gini yang angkanya bergerak antara 0 dan 1. Bila gini rasio mendekati 0 maka dikatakan distribusi pendapatan semakin merata dan bila gini rasio mendekati satu maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Dalam kaitan ini Emil Salim mengatakan: "dilihat dari koefisien gini, sampai tahun 1980-an Indonesia tergolong baik, tapi setelah tahun 1990-an menjadi kurang baik" (Gatra, Agustus 1995). Perhatian pemerintah terhadap masalah pemerataan ini sebenarnya sudah diketahui sejak awal Pelita I melalui program yang disebut *Trilogi Pembangunan*, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya. Bahkan pada Pelita III PJPT I, Pemerataan ditempatkan pada nomor yang pertama. Konflik mengenai masalah distribusi pendapatan ini sampai mendorong Presiden Suharto, pada tanggal 4 Maret 1990, didepan para konglomerat di Tapos, mengatakan:

"Stabilitas nasional memungkinkan pertumbuhan dan pertumbuhan memungkinkan dilakukannya upaya pemerataan. Apabila pertumbuhan ekonomi tercapai tapi pemerataan tak bisa diwujudkan maka akan timbul kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, sampai kepada gejolak sosial. Dan jika itu terjadi maka pertumbuhan yang dicapai akan hancur".

Rupanya masalah pemerataan sudah menjadi isu yang sangat penting pada saat ini sampai-sampai seorang Presiden mengemukakan masalah tersebut dan mengingatkan para konglomerat bahwa persoalan itu sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan betapa berbahayanya masalah itu apabila dibiarkan.

Menurut hasil Susenas yang dilakukan BPS, pada tahun 1980 besarnya rasio Gini = 0,34, pada tahun 1987 sebesar = 0,32, sedangkan pada tahun 1993 rasio Gini mencapai 0,335 yang berarti pada tahun 1993 distribusi pendapatan lebih buruk dari tahun 1987.

Karena itu pulalah seringkali distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) yang tidak merata ini dituduhkan sebagai alasan terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang ini timbul. Dari mulai peristiwa Situbondo, Jakarta (27 Juli), Tasikmalaya, Sanggau (Kalimantan), Tanah Abang (Jakarta, 2x), dan terakhir Rengasdengklok.

Secara jelas, Arif Budiman, Kompas, Senin, 10 Maret 1997, hal 4, mengemukakan bahwa apabila dihitung dari 20 orang pembayar pajak perorangan terbesar 1996, ke dua puluh orang tersebut membayar pajak sebesar Rp.67.684.000.000,- (30% dari pendapatan) dengan demikian pendapatan ke 20 orang tersebut adalah sebesar Rp. 225.613.333.300,- atau rata-ratanya Rp. 11.280.666.650,- per orang per tahun atau Rp. 30.905.936,- per hari atau Rp. 1.287.747,3 per jam atau Rp. 21.462,5 per detik. Hal ini kalau dibandingkan dengan UMR tertinggi (DKI Jaya) yang sebesar Rp. 5.700,- /hari maka pendapatan pekerja per hari masih lebih kecil dari pendapatan orang terkaya tersebut per detik. Apalagi kalau dibandingkan dengan UMR terendah, misalnya Jateng Rp.3.200,- per hari. Atau pendapatan orang tersebut per hari adalah 6.181,1872 kali dari pendapatan pekerja per hari.

Kwik Kian Gie, pada Surat Kabar yang sama, mempunyai persepsi mengenai pidato Presiden Suharto bahwa kesenjangan bukanlah suatu efek dari pertumbuhan ekonomi (pembangunan) melainkan sebagai bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Sehingga Kwik menarik kesimpulan bahwa kesenjangan tersebut merupakan bagian dari perencanaan. Oleh karena itu, jika memang demikian, kita masih harus bersabar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas masalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan merupakan masalah yang berbeda. Tetapi ini tidak dapat diartikan bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan dan tidak saling mempengaruhi. Dalam kaitan ini R.M. Sundrum (1983) mengatakan:

"In most elementary expositions, the analysis of income distribution is divorced from that of aggregate income, and carried out in terms of quite distinct factors, often of a political nature. However, there is a close interaction between the growth of total income and its distribution; the growth of income influences, and is also influenced by, its distribution, and these interactions are influenced by various development factors. Therefore the distribution of income must be given a central place in development economics."

Distribusi pendapatan yang merata (equal) hanya dapat dicapai di negara-negara komunis. Tetapi realita menunjukkan bahwa komunis telah dipandang gagal didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan distribusi pendapatan yang merata seperti dicapai negara-negara komunis bukanlah *equality* yang ideal. Sedangkan di negara-negara selain komunis dapat dikatakan telah terjadi distribusi pendapatan yang tidak merata.

Seperti telah dikemukakan di atas; pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh distribusi pendapatan. Masalahnya distribusi pendapatan seperti apa yang mempengaruhi pertumbuhan. Apakah distribusi pendapatan yang merata dapat meningkatkan pertumbuhan, apakah distribusi pendapatan yang merata menghambat pertumbuhan, apakah distribusi yang tidak merata meningkatkan pertumbuhan dan apakah distribusi pendapatan yang tidak merata justru menghambat pertumbuhan?

KERANGKA TEORITIS

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran itu maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga terjadi peningkatan pendapatan per kapita. Sekalipun pendapatan per kapita bukan merupakan indikator terbaik dan memiliki kelemahan; namun ia banyak dipakai oleh para ekonom untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Pendapatan per kapita hanya merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan penerimaan pendapatan bagi setiap orang. Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna (*absolute equality*) maka tiap orang akan memperoleh pendapatan yang besarnya sama. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan per kapita disuatu perekonomian tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara umum, hal ini sangat bergantung pada distribusi pendapatan yang terjadi. Negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Perancis ternyata mempunyai distribusi pendapatan yang sangat tidak merata diantara negara-negara maju (Paul Samuelson).

Pertumbuhan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu perekonomian tidak hanya mempengaruhi distribusi pendapatan tetapi ia juga dipengaruhi oleh distribusi pendapatan. Para ekonom yang mendasarkan diri pada pendekatan fungsi produksi, berpendapat bahwa hubungan paling nyata antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat tabungan. Sehingga kesimpulan yang biasa ditarik ialah bahwa semakin merata distribusi pendapatan semakin tinggi tingkat tabungan dan dengan demikian semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Dipihak lain terdapat pendapat yang berbeda yaitu bahwa suatu distribusi pendapatan yang tidak merata diperlukan untuk memberikan rangsangan untuk usaha yang lebih besar/kuat untuk suplai tenaga kerja, untuk suplai keahlian-keahlian teknis dan entrepreneurial yang lebih cepat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kesimpulan yang biasa ditarik ialah semakin tidak merata distribusi pendapatan maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan.

Kemungkinan lainnya ialah bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata (*inequality*) akan menghambat pertumbuhan ekonomi - *inequality is harmful for growth*. Pernyataan ini mempunyai argumentasi sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi sebagian besar ditentukan oleh akumulasi dari capital, human capital dan pengetahuan yang dipergunakan dalam produksi. Insentif untuk terjadinya

akumulasi yang produktif bergantung pada kemampuan individu-individu untuk memperoleh pendapatannya dari usaha-usaha yang dilakukannya. Hal ini pada gilirannya sangat bergantung pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pajak dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengaturnya yang dianut. Torsten Persson and Guido Tabellini (1994), mengemukakan:

"In a society where distributional conflict is more important, political decisions are likely to result in policies that allow less, private appropriation and therefore less accumulation and less growth. But the growth rate also depends on political institutions, for it is through the political process that conflicting interests ultimately are aggregated into public-policy decisions."

Teori pertumbuhan endogenous telah menjelaskan pentingnya kebijaksanaan-kebijaksanaan (*policies*) untuk terjadinya pertumbuhan, tapi teori ini belum membuat kaitan antara distribusi pendapatan, politik dan kebijaksanaan. Demikian pula literatur mengenai *endogenous policy* telah menunjukkan pentingnya distribusi bagi kebijaksanaan tetapi belum dibuat hubungan antara kebijaksanaan dan pertumbuhan.

Dalam karyanya yang independen tetapi melengkapi pendapat ini; Alberto Alesina dan Dani Rodrik (1993) dan Roberto Perotti (1993) telah mempelajari determinan *tax policy* dalam political equilibrium dari suatu endogenous-growth model dimana Alesina dan Rodrik juga menemukan suatu hubungan empiris negatif antara distribusi pendapatan yang tidak merata (inequality) dan pertumbuhan.

Karya klasik yang menghubungkan antara pembangunan dan distribusi pendapatan ialah yang dikemukakan oleh Simon Kuznets. Hipotesa yang dikemukakannya ialah bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata meningkat pada awalnya dan kemudian menurun sesuai dengan berjalannya pembangunan. Oleh karena itu karya Kuznets (Kuznets Curve) berhubungan dengan pertanyaan mengenai bagaimana tingkat pendapatan mempengaruhi distribusi pendapatan. Sedangkan karya dari Persson and Tabellini (1991, dan 1994) berhubungan dengan pertanyaan bagaimana distribusi pendapatan mempengaruhi perubahan pendapatan (pertumbuhan).

Kebanyakan penelitian mengenai distribusi pendapatan terutama lebih berkaitan dengan analisa hubungan-hubungan statistik daripada analisa teoritis. Pareto dan Kuznet, secara terpisah, mencoba menemukan pola standar dari distribusi pendapatan. Pareto's law merupakan suatu pola dimana logaritma persentase kumulatif diatas suatu tingkat pendapatan tertentu merupakan suatu fungsi linier dari logaritma pendapatan itu sendiri. Sedangkan Kuznet menemukan bahwa hubungan antara inequality dan pendapatan sepanjang waktu berbentuk U. Ekonom lain seperti Ahluwalia (1976) melakukan analisa regresi terhadap cross-section data internasional untuk mengidentifikasi karakteristik nasional yang berkaitan dengan berbagai tingkat income inequality, dimana ia menemukan hubungan berbentuk U antara inequality dan pendapatan per-kapita.

Sekalipun demikian Sundrum membedakan distribusi pendapatan yang terjadi di *masyarakat tradisional* dan distribusi pendapatan di *masyarakat yang sudah komersial*. Pada negara-negara dengan sistem *free enterprise* tanpa intervensi kebijaksanaan pemerintah, distribusi pendapatan ditentukan oleh *classical determinants*. Pada negara yang kurang berkembang dan menganut sistem ini, konsekuensinya adalah penyebaran kemiskinan dan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata, hal ini disebabkan stok kapital dan tanah relatif lebih sedikit daripada jumlah pekerja; sehingga laba dan sewa lebih tinggi daripada upah dan lebih jauh disebabkan oleh pemilikan tanah dan kapital yang lebih terkonsentrasi.

Dari hasil penelitian yang diperoleh para ekonom mencoba menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Ricardo (1952), mengemukakan :

"Political economy ... should rather be called an enquiry into the laws which determine the division of the produce of industry among the classes who concur in its information"

Secara tidak langsung, Ricardo mengemukakan bahwa masalah pemerataan distribusi pendapatan tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan diri pada ilmu ekonomi murni, melainkan harus pada ekonomi politik; dimana kebijaksanaan pemerintah menjadi sangat penting.

Disamping itu Adelman dan Morris (1971a, 1973) menemukan sejumlah karakteristik nasional yang berkorelasi dengan distribusi pendapatan yang tidak merata (inequality), antara lain:

- semakin tinggi partisipasi sekolah semakin rendah inequality dan semakin rendah pendapatan kelompok pendapatan rendah dan menengah;
- semakin besar national resource endowment semakin besar inequality dan semakin besar bagian pendapatan dari kelompok lima persen teratas;
- semakin tinggi investasi total pemerintah semakin rendah bagian pendapatan kelompok lima persen teratas;
- semakin tinggi tingkat dualisme perekonomian; semakin buruk distribusi pendapatan
- semakin besar peluang partisipasi politik semakin merata distribusi pendapatan.

Pada banyak negara dengan distribusi pendapatan tidak merata, pendapatan yang tinggi tidak selalu berasal dari usaha-usaha yang besar atau penggunaan keahlian melainkan berasal dari distribusi pemilikan yang tidak merata dan distribusi akses yang tidak merata terhadap kekuatan-kekuatan politik. Dimana dengan adanya kekuatan politik maka kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dapat dipengaruhi supaya mengarah kepada distribusi pendapatan yang lebih merata.

Seperti telah dikemukakan di muka; Sundrum (1983) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang *erat dan timbal balik* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Interaksi antara keduanya dipengaruhi juga oleh berbagai faktor pembangunan. Karena itulah, sebenarnya distribusi pendapatan harus mendapat tempat yang penting dalam pembangunan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi umumnya kurang memberi perhatian terhadap pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori-teori itu hanya memberi perhatian bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik melalui aspek ekonomi sendiri maupun melalui aspek nonekonomi. Misalnya distribusi pendapatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui perannya dalam meningkatkan permintaan domestik. Menurut Alesina dan Perroti (1994), distribusi pendapatan yang baik dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Sedangkan untuk aspek nonekonomi, distribusi pendapatan yang sangat tidak merata akan menciptakan berbagai kesenjangan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian negara itu sendiri.

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.

Penelitian yang penulis telah lakukan menggunakan model yang dikemukakan oleh Persson dan Tabellini (1991, 1994) dari makalahnya yang berjudul *"Is inequality harmful for growth"*. Dalam makalahnya ia menggabungkan model berupa Economic equilibrium $g^* = G(w, r, \theta)$ dan Political equilibrium $\theta^* = \theta(w, r, e^m)$, apabila political equilibrium tidak dicari, maka diperoleh

$$g^* = G(w, r, \theta^* = \theta(w, r, e^m)).$$

g^* = pertumbuhan ekonomi; didekati melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto;

w = tingkat keahlian; didekati dengan tingkat pendidikan para pekerja;

r = tingkat pengembalian; didekati melalui tingkat bunga riil;

e^m = distribusi pendapatan; didekati melalui rasio GINI.

Dengan memakai persamaan ekonometrika maka diperoleh :

$$GPDRB = \gamma_0 + \gamma_1 TPP + \gamma_2 TKBR + \gamma_3 GINI + \varepsilon$$

GPDRB = tingkat pertumbuhan PDRB;

TPP = tingkat pendidikan pekerja;

GINI = distribusi pendapatan.

TKBR = Tingkat Bunga Riil. (Tk bunga - tk inflasi).

Penelitian yang dilakukan penulis mencakup 26 propinsi (tidak mencakup propinsi Timor Timur) untuk tahun 1980, 1981, 1984, 1987, 1990, dan 1993. Penelitian dilakukan untuk Indonesia (26 propinsi), untuk Indonesia Bagian Barat (IBB = 17 propinsi) dan Indonesia Bagian Timur (IBT = 9 propinsi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya untuk IBB distribusi pendapatan tidak merata berpengaruh positif secara signifikan ($\alpha = 10\%$) terhadap pertumbuhan ekonomi. yang berarti semakin buruk distribusi pendapatan (GINI meningkat) semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena pertumbuhan ekonomi Indonesia dimotori oleh IBB, dimana kegiatan perekonomian Indonesia terpusatkan. Secara ekonometrika hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh dimana data pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sangat bervariasi di IBB.

Dengan demikian bukan hanya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan tetapi distribusi pendapatan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kuznets (1955, 1963), dan Myrdal (1957) mengemukakan bahwa proses industrialisasi dan urbanisasi mendorong ke arah distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, karena pada tahap awal, pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor modern. Hanya pada tingkat pendapatan yang relatif tinggi dimana kemajuan teknologi mempengaruhi ekonomi dan redistribusi melalui transfer pendapatan dapat dikatakan signifikan.

Kuznet (1963) berpendapat bahwa pendapatan di sektor industri dan jasa bukan saja tinggi melainkan juga terdistribusi secara tidak merata. Pada awal pembangunan faktor-faktor ini memberikan kontribusi terhadap semakin tidak meratanya distribusi pendapatan. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa terdapat kecenderungan distribusi pendapatan yang tidak merata meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan sampai suatu titik tertentu dan kemudian menurun. Hubungan tersebut membentuk kurva U. Ia memberi contoh demikian:

Tabel 3.1. Indeks GINI Beberapa Negara Berdasarkan Pendapatan Perkapitanya

Pendapatan per kapita (US \$)	Rata-rata Nilai Indeks GINI
di bawah 150	0,441
150 - 299	0,472
300 - 499	0,493
500 - 999	0,479
1000 - 2499	0,384
2500 keatas	0,380

Sumber: Jain, 1975.

Data koefisien Gini propinsi-propinsi menunjukkan peningkatan sejak tahun 1980 sampai tahun 1983; yang berarti semua propinsi distribusi pendapatannya semakin memburuk. Yang mengalami penurunan koefisien Gini hanyalah propinsi Lampung, DI Yogya, Sulsel, Sulteng, NTB, NTT, sedangkan 19 propinsi lainnya meningkat; yang berarti distribusi pendapatan semakin memburuk. Pada tahun 1994; pendapatan per kapita sudah mencapai US \$ 778, apakah ini menjadi titik balik penurunan koefisien GINI ?, masih harus ditunggu.

Dengan cara lain kita dapat melihat ketimpangan PDRB dimana pada tahun 1980, 1990, dan 1993 terlihat ketimpangan PDRB antar propinsi. Dimana pada tahun 1980 PDRB tertinggi dicapai oleh propinsi Riau sebesar Rp.3.620.998,- dan PDRB terendah di propinsi NTT sebesar Rp. 143.321,- yang berarti hanya 1/25 PDRB tertinggi. Tahun 1990, PDRB terendah naik menjadi 1/14 PDRB tertinggi, dan tahun 1993, PDRB terendah naik lagi menjadi 1/12 PDRB tertinggi. Sekalipun demikian ini menunjukkan perbedaan PDRB antara propinsi cukup besar. Untuk Indonesia Bagian Timur, untuk ke tiga tahun pengukuran tersebut, selalu berada di bawah rata-rata PDRB Nasional. Dimana tahun 1980 sebesar Rp. 598.148,2 , tahun 1990 sebesar Rp.752.205 dan tahun 1993 sebesar Rp. 835.541,-

Bagi para ekonom yang mendasarkan diri pada pendekatan fungsi produksi, menekankan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi kapital. Tingkat akumulasi kapital bergantung

pada saving ratio, proporsi pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan, yang umumnya diasumsikan ditentukan oleh pendapatan dan per kapita. Oleh karenanya hubungan yang paling nyata antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi ialah *tingkat tabungan*. Kesimpulan yang biasa ditarik ialah semakin merata distribusi pendapatan; saving ratio akan semakin rendah dan dengan demikian semakin rendah pula pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain; semakin tidak merata distribusi pendapatan, saving rasion akan semakin tinggi, dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. Kaldor (1978), mengemukakan bahwa karena suatu tingkat tabungan yang tinggi merupakan suatu prasyarat pertumbuhan yang cepat, pendapatan harus terkonsentrasi pada orang-orang kaya dimana marginal propensity to save mereka tinggi.

Perubahan struktur ekonomi di negara-negara sedang berkembang umumnya terjadi bersamaan dengan semakin rendahnya kontribusi sektor pertanian dibarengi dengan semakin tingginya kontribusi sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan PDB Indonesia, dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi, dengan sendirinya sebagian besar merupakan hasil sumbangan sektor-sektor di luar sektor pertanian, yaitu sektor industri dan sektor jasa. Hal ini terlihat jelas dari data pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.
Penduduk yang bekerja, Produktivitas per-pekerja dan PDB Indonesia
1980, 1985 dan 1990

Sektor	PDB (Milyar Rp, harga 1983)			Penduduk yang bekerja (ribu orang)			Produktivitas per pekerja (ribu Rp)		
	1980	1985	1990	1980	1985	1990	1980	1985	1990
Pertanian	16.399,2 (23,17)	19.300,0 (22,68)	22.604,5 (19,58)	28.834,0 (55,93)	34.141,8 (54,66)	35.450,4 (49,25)	568,75	565,29	637,64
Industri	31.409,0 (44,39)	33.779,8 (39,7)	47.255,3 (40,91)	6.709,5 (13,17)	8.376,7 (13,41)	11.941,5 (16,59)	4.625,43	4.032,59	3.957,23
Industri Manuf.	8.910,4 (12,59)	13.340,5 (15,79)	22.276,7 (19,30)	4.680,1 (9,08)	5.795,9 (9,28)	8.211,2 (11,42)	1.903,89	2.317,24	2.709,67
Jasa	22.954,6	32.002,1	45.587,3	15.615,9	19.879,7	23.522,5	1.469,96	1.609,79	1.938,03

Sumber: Mohamad Arsyad Anwar, World Bank, dan BPS.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa produktivitas per pekerja sektor pertanian merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor Industri, terutama industri manufaktur, dan sektor jasa. Demikian pula pertumbuhan produktivitas per pekerja, sektor pertanian tetap merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Hal ini dapat dihitung, dimana PDB sektor pertanian sekalipun mengalami peningkatan tetapi sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jumlah pekerja di sektor pertanian menurun sangat lambat yang berakibat pertumbuhan produktivitas per pekerja sektor pertanian berjalan lambat.

KESIMPULAN.

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari uraian di atas:

1. Distribusi pendapatan di Indonesia masih tidak merata, sekalipun terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari tahun - ketahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dimana distribusi penyerapan jumlah tenaga kerja antar sektor yang tidak merata dan distribusi pendapatan antar propinsi (regional) yang juga sangat tidak merata.

2. Hipotesa yang diajukan oleh Persson, Torsten dan Tabellini (1991, 1994) bahwa "inequality harmful for growth" tidak berlaku untuk kasus Indonesia.
3. Distribusi pendapatan yang tidak merata di Indonesia ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita; khususnya untuk kasus Indonesia Bagian Barat (IBB). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ekonom yang mendasarkan diri pada pendekatan produksi, yang menekankan mesin pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi kapital. Pendapatan harus terkonsentrasi pada orang-orang kaya dimana marginal propensity to save mereka relatif tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Nisha. 1996. "The Benefits of Growth for Indonesian Workers", Country Department III, *East Asia and Pacific Region*, The World Bank.
- Ahluwalia, Montek S, 1976 "Inequality, Poverty, and Development", World Bank Reprint Series, no 36, *Journal of Development Economics* 3.
- Akita, Takahiro, and Lukman, Rizal Afandi, 1995. "Interregional Inequalities in Indonesia: A Sectoral decomposition Analysis for 1975 - 92", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 31 no 2.
- Anwar, M Arsyad, 1992. *Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, 1980 - 1990*, dalam Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Ekonomi UI, ISEI & Gramedia, Jakarta.
- Basri, Faisal H, dan Munandar, Haris, 1995. Tinjauan Ekonomi Politik Atas Lingkungan Bisnis DI Indonesia, Seri Karya Tulis Ilmiah Dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Stdi Pembangunan, Manajemen serta Akuntansi, Publikasi FE UI, No 006, Jakarta, Juli
- Birdsall, Nancy, David Ross., 1995. Richard Sabot, "Inequality and Growth Reconsidered: Lessons From East Asia". *The World Bank Economic Review*, Vol. 9.No 3,
- Grossman. Gene M, and Helpman, Elhanan, 1994. "Endogenous Inovation in The Theory of Growth", *Journal Of Economic Perspective*, Vol. ,
- Pack, Howard, "Endogenous Growth Theory : Intellectual Appeal and Empirical Shortcoming", *Journal of Economic Perspective*, Vol. 8, 1994.
- Papanek, Gustav F, 1990. *Economic Growth, Income Distribution, And The Political Process in Less Developed Countries*, Center For Asian Development Studies, Boston University.
- Persson, Torsten, and Tabellini Guido, 1991."Is inequality Harmful for Growth?", *The American Economic Review*,
- Persson, Torsten, and Tabellini Guido, 1994."Is inequality Harmful for Growth?", *The American Economic Review*,
- Romer, Paul M, 1994. "The Origins of Endogenous Growth", *Journal of Economic Perspective*, Vol.8,
- Romer, Paul M, 1986."Increasing Returns and Long-run Growth". *Journal of Political Economy*, Vol 94, No.5,
- Solow, Robert M, 1994. "Perspective on Growth Theory", *Journal of Economic Perspective*, Vol 8,
- Syahrir, 1991. *Analisis Ekonomi Indonesia*, Gramedia, Jakarta,
- Syahrir, 1992. *Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia 1968 - 1992*, Gramedia, Jakarta,
- Sundrum, RM, 1983. *Development Economics, A framework for Analysis and Policy*, John Wiley and Sons, Tokyo,